

KPU Kembalikan Sisa Anggaran Rp 3 M

ARGOMULYO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga akan mengembalikan sisa anggaran yang tidak terpakai pada Pemilu 2014.

Sekitar Rp 3,3 miliar sisa dana akibat efisiensi anggaran barang dan jasa dan akan dikembalikan ke kas APBN.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Salatiga, Putnawati saat memberi keterangan kepada wartawan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu 2014 di sekretariat KPU Salatiga, Rabu (24/12). Acara juga dihadiri anggota KPU lainnya, Sujit Mudjirno.

Menurut Putnawati, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 di Salatiga lalu menghabiskan

anggaran sekitar Rp 7 miliar. Sedangkan anggaran yang disediakan mencapai Rp 10,3 miliar uang negara. Ini sama dengan 63% nya dari total anggaran yang disediakan. Sehingga, masih ada sisa sebesar Rp 3,3 miliar dan dana tersebut masih berada di kas APBN.

"Hingga selesainya pesta demokrasi atau Pileg 2014 lalu, anggaran yang tersisa masih sebesar Rp 3,3 miliar. Dan kini dana tersebut masih tersimpan di kas APBN," katanya.

Menurutnya, sesuai dengan



Putnawati

SM/Moch Kundori

hasil pemeriksaan BPK, penyalahgunaan, penyelewengan, mau pun penyalahgunaan wewenang ternyata sama sekali tidak ditemukan. Salatiga termasuk salah satu uji petik dari

BPK itu.

Tak Sewa Gedung

Dikatakan, efisiensi anggaran KPU selama ini karena sudah memiliki gedung sendiri sehingga tidak perlu menyewa dan pemilu presiden satu putaran. Secara keseluruhan pelaksanaan pemilu 2014 di Salatiga berjalan sukses. Hal ini bisa dilihat minimnya pelanggaran dan juga tingginya partisipasi pemilih. Untuk Pilpres, partisipasi mencapai 81 persen, sedangkan Pileg mencapai 82 persen.

Wanita asli Blora ini menuturkan, persoalan yang mendapat perhatian pada pemilu lalu adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang selalu berubah-ubah. Ini bisa dilihat dengan penetapan DPT yang hingga empat kali saat Pileg lalu.

"Ini dilakukan karena men-

gakomodasi seluruh warga yang mempunyai hak pilih. Harapan kami bisa menjamin hak konstitusi setiap warga agar bisa terdaftar dan berpartisipasi bagi yang memenuhi syarat. Oleh karena itu kami selalu menampung usulan masyarakat," katanya.

Masalah DPT ini, lanjut Putnawati, menjadi evaluasi ke depan untuk lebih baik lagi. Dalam hal ini KPU menjalin koordinasi dengan dinas terkait seperti Disdukcapil atau Kementerian Dalam Negeri yang urusannya tentang kependudukan.

"Tahun 2015, tetap ada anggaran untuk KPU guna sosialisasi pemilih agar lebih cerdas. Ini untuk mengantisipasi diberlakukannya Perpu Pilkada langsung. Jika mengacu Perpu, Pilkada Salatiga akan dilakukan pada 2018," katanya. (H32-72)